



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5224658, Faksimili : 021-5225044
Website : www.imigrasi.go.id email : keuangan.imigrasi@gmail.com

Nomor : IMI – KU.01.05 - 1584
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran TA. 2018

13 April 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
di
Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
 - b. DIPA Induk Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.0/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 0857-4359-4998-0810;
 - c. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Nomor SP DIPA-013.06.2.407933/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 5644-4940-8703-1800;
 - d. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Langsa Nomor SP DIPA-013.06.2.409026/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 9420-4008-8953-6493;
 - e. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas II Bagan Siapi-api Nomor SP DIPA-013.06.2.408092/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 7664-5046-0557-0781;
2. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tema revisi adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - b. Mekanisme revisi adalah:
 - 1) pergeseran rincian anggaran antar Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang besar nilai usulan revisinya lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Keluaran (*output*) yang direvisi dan tidak mengurangi volume Keluaran (*output*);
 - 2) pergeseran rincian anggaran antar Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang besar nilai usulan revisinya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Keluaran (*output*) yang direvisi dan tidak mengurangi volume Keluaran (*output*);
 - 3) pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
 - a. Perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan anggaran yang berakibat pada percepatan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemenuhan belanja modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menunjang operasional kantor serta pemenuhan anggaran untuk internalisasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pegawai guna pengembangan kualitas mutu pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;
 - c. Pemenuhan kebutuhan belanja modal dalam menunjang operasional perkantoran pada Kantor Imigrasi Kelas II Langsa;
 - d. Pemeliharaan dan penghapusan arsip guna mengurangi belanja pemeliharaan arsip dan belanja modal pengadaan lemari arsip pada Kantor Imigrasi Kelas II Bagan Siapi-api;
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L;
 - c. Form RKA A dan B;

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
7. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
8. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau.